



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN  
NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI  
BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA  
BONTANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN,  
KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,  
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG DAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 10 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

1. Basri Rase
2. Andi Faisal Sofyan Hasdam
3. Junaidi
4. Agus Haris

**PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Yualita Widyadhari              | 12. Winter Sigiro         |
| 2. Vivi Novita Rido                | 13. Aswendi Kamuli        |
| 3. Syarifah Hadzami                | 14. Novita Sari           |
| 4. Elizabeth Eva Djong             | 15. Ruli Iskandar         |
| 5. Dewantari Handayani             | 16. Harina Wahab Jusuf    |
| 6. Yayuk Sri Wahyuningsih          | 17. Laurensia Siti Nyoman |
| 7. Merry Susanti Siaril            | 18. Mirna Karmila Ananta  |
| 8. Ofiyati Sobriyah                | 19. Gerda Joice Lusia     |
| 9. Retno Rini Purwaningsih Dewanto | 20. Bambang Sularso       |
| 10. Anna Wong                      | 21. Nanang Karma          |
| 11. Esty Paranti                   | 22. Rina Utami Djauhari   |

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 10 Juli 2024, Pukul 11.05 – 11.12 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN****MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Mardian Wibowo  
Ria Indriyani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024:**

1. Andi Faisal Sofyan Hasdam
2. Junaidi
3. Agus Haris
4. Ahrianto

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024:**

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. Aan Sukirman
3. Habloel Mawadi
4. Jordan Jonarto
5. Rizky Anugrah Putra
6. Meyrinda Rahmawaty Hilipito
7. Radhitia Tri Putro
8. Ferdinand Caspar Omar Syarif

**C. Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024:**

1. Dewantari Handayani
2. Merry Susanti Siaril
3. Ofiyati Sobriyah
4. Lieke Tukgali
5. Ruli Iskandar
6. Rina Utami Djauhari

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024:**

1. Saiful Anam
2. Danies Kurniartha
3. Achmad Umar
4. Fuad Abdullah
5. Muhammad Zuhul Qolbu Lathof

**E. Pemerintah:**

1. Purwoko (Kemenkumham)
2. Syahmardan (Kemenkumham)
3. Wahyu Jaya Setia (Kemenkumham)
4. Fauzi Ibrahim Reza (Kemenkumham)
5. Isnandar Aristo Prabowo (Kemendagri)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.05 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 14 ... maaf, Nomor 10 dan Nomor 14/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Pertama, sebelum dilanjutkan, kami dari Majelis Hakim, mohon maaf karena persidangan tertunda dan juga ada juga yang dipercepat. Karena berdasarkan laporan dari Kepanitraan, agenda persidangan pada hari ini belum bisa dilanjutkan karena adanya ... belum siapnya pihak yang seharusnya mempersiapkan pembuktian pada hari ini.

Namun demikian, semua ini pertimbangannya hanya karena efisiensi saja. Jadi kita gabung untuk sekaligus penundaan, daripada dilakukan penundaan dua kali juga akhirnya juga apa ... hanya akan menunda saja. Karena tadi ada Rapat Hakim yang memang waktunya agak menyita waktu yang cukup menunda, panjang anu apa ... diskusinya. Oleh karena itu, sekali lagi mohon maaf.

Baik, supaya tahu mana yang Pemohon Nomor 10 dan 14, supaya diperkenalkan, Nomor 10 terlebih dahulu. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024: R. AHMAD WALUYA MUHARAM [01:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon hadir Kuasanya saya sendiri R. Ahmad Waluya Muharam. Di sebelah saya, Aan Sukirman. Di belakang, Habloel Mawadi, S.H., M.H., Rizky Anugrah Putra, dan Jordan Jonarto, S.H. Hadir pula Prinsipal kami, Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam, S.H., Junaidi, Pak Agus Haris, S.H., dan Pak Ahrianto. Juga dari ... mengikuti dari sidang daring, dari Pemkot Kota Bontang yang diwakili oleh bagian hukumnya. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [02:38]**

Baik, terima kasih.  
Nomor 14, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024: SAIFUL ANAM [02:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 14, kami yang hadir Kuasa Hukum juga sebagian dari Para Pemohon. Dari Kuasa Hukum, saya sendiri Saiful Anam, kemudian di kanan saya ada Fuad Abdullah, S.H., M.Si., kemudian di kanan saya ada Danies Kurniartha, S.H., kemudian di kanan saya ada Achmad Umar, S.H., M.H., dan di belakang saya ada Muhammad Zuhul Qolbu Lathof, S.H. Kemudian untuk Para Pemohon, karena banyak, Yang Mulia, tidak kami sebutkan satu per satu. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [03:24]**

Baik. Terima kasih, Pak.  
Dari Pemerintah, silakan, Pak Purwoko.

**6. PEMERINTAH: PURWOKO [03:30]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Syahmardan, kemudian sebelah kirinya Bapak Wahyu Jaya. Saya sendiri, Purwoko. Dan sebelah kiri saya, Bapak Isnandar Aristo. Kemudian yang sebelah kiri lagi, Bapak Fauzi Ibrahim Reza, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [03:57]**

Baik. Terima kasih, Pak Purwoko.  
Jadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bagian Kepaniteraan ataupun Persidangan bahwa Pemerintah atau Presiden yang sedianya menyampaikan keterangan pada sidang hari ini belum siap dengan keterangannya. Apakah benar seperti itu, Pak?

**8. PEMERINTAH: PURWOKO [04:21]**

Ya. Izin, Yang Mulia, benar. Kami melakukan penundaan untuk pembacaan keterangan presiden hari ini.

**9. KETUA: SUHARTOYO [04:26]**

Minta penundaan, bukan *melakukan penundaan*.

**10. PEMERINTAH: PURWOKO [04:28]**

Ya, mohon penundaan.

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:28]**

Kapan Bapak siap akan disampaikan keterangan itu?

**12. PEMERINTAH: PURWOKO [04:33]**

Mohon izin, Yang Mulia, mengikuti sesuai jadwal selanjutnya.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:42]**

Di sini tanggal 20 untuk 10 ... Nomor 10, tanggal 18 Juli.

**14. PEMERINTAH: PURWOKO [04:51]**

Ya.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:51]**

Untuk 14, tanggal 22?

**16. PEMERINTAH: PURWOKO [04:53]**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:54]**

Atau bisa dibarengkan seperti hari ini, tanggal 18 semua?

**18. PEMERINTAH: PURWOKO [05:01]**

Izin, bisa, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:05]**

Baik. Baik, untuk dua perkara, tanggal 18, ya, Pak? Pak Purwoko?

**20. PEMERINTAH: PURWOKO [05:15]**

Izin, gimana?

**21. KETUA: SUHARTOYO [05:15]**

Hanya jamnya yang berbeda.

**22. PEMERINTAH: PURWOKO [05:17]**

Ya, siap.

**23. KETUA: SUHARTOYO [05:17]**

Nanti akan, ini 10.30 WIB dan ... 13.30 WIB dan 10.30 WIB.

**24. PEMERINTAH: PURWOKO [05:25]**

Siap, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:27]**

Pada hari yang sama, 18 Juli 2024.

Dan kemudian ini karena Bapak juga tahu ini animo dari Pemohon dan Prinsipal ini kan sangat apa ... mengharapkan persidangan cepat sepertinya karena yang hadir juga cukup banyak. Jangan sampai nanti minta penundaan lagi, Pak, ya?

**26. PEMERINTAH: PURWOKO [05:48]**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [05:48]**

Ini kesempatan terakhir untuk diperhatikan.

Itu, ya, Kuasa Hukum dari Perkara 10 dan 14, mohon dipahami dan dimaklumi karena belum siap dan Mahkamah juga tidak bisa kemudian menolak permohonan penundaan itu. Mungkin ini memang permohonannya penting, Pak, sehingga perlu ada koordinasi lintas ... lintas kementerian atau dengan lembaga lain yang terkait. Jadi sabar, tapi mungkin nanti lebih optimal substansinya yang bisa disampaikan Pemerintah.

Baik, untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah. Kalau DPR memang menyampaikan surat izin tidak atau belum bisa hadir, suratnya ada di Meja Hakim.

Oleh karena itu, untuk beri kesempatan kepada Pihak Pemerintah menyampaikan keterangan dan juga DPR akan dipanggil kembali untuk sidang tanggal 18 Juli 2024, maka persiapan hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali pada hari Kamis, 18 ... 18 Juli 2024

untuk Perkara Nomor 10 jam 10.30 WIB, untuk Nomor 14 jam 13.30 WIB. Semua pihak supaya hadir, tanpa dipanggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.12 WIB**

Jakarta, 10 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

